

Analisis Belanja Publik Aceh 2011



Gambaran Umum¹

Besarnya anggaran adalah syarat awal, akan tetapi alokasi belanja serta bauran kegiatan pembangunan yang tepat berdasarkan analisis adalah syarat utama dalam pembangunan. Jumlah keseluruhan penerimaan Aceh pada akhir tahun 2027 (pada saat berakhirnya Dana Otonomi Khusus) diperkirakan akan berjumlah lebih dari Rp650 triliun yang bersumber dari dana Otsus dan tambahan bagi hasil minyak dan gas. Peningkatan terhadap kualitas perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatan anggaran publik di Aceh menjadi semakin penting dalam memastikan keluaran pembangunan yang lebih baik.

Belanja untuk pemerintahan umum memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja Aceh, sedangkan porsi belanja infrastruktur menurun pada tahun 2011. Peningkatan terhadap belanja administrasi pemerintahan turut dipengaruhi oleh pemekaran daerah baru termasuk jumlah kecamatan dan desa. Alokasi belanja sektor infrastruktur pada tahun 2011 terhitung sebesar 17 persen. Belanja pegawai merupakan belanja terbesar pemerintah di kabupaten/kota. Belanja pegawai tercatat sebesar 59 persen dari keseluruhan belanja, meninggalkan sedikit ruang bagi belanja untuk pembangunan. Penambahan jumlah pegawai, pemekaran kecamatan dan desa adalah salah satu penyebab meningkatnya belanja pemerintahan umum.

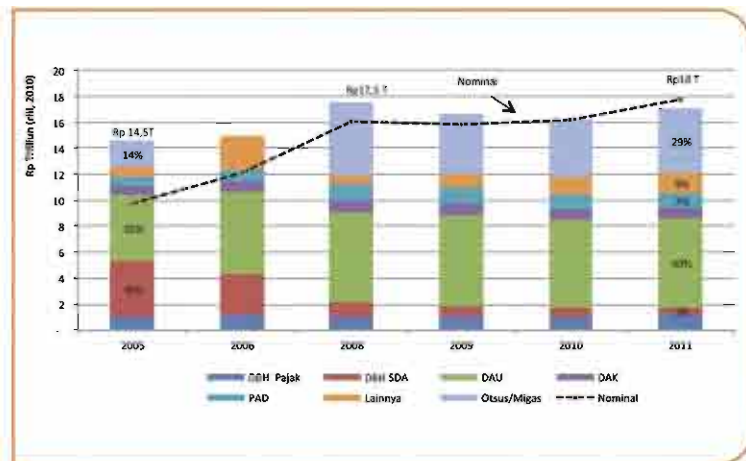
Capaian keluaran kesehatan menunjukkan peningkatan akan tetapi beberapa tantangan utama masih ada. Pembiayaan kesehatan Aceh tercatat terus meningkat, mencapai lebih dari Rp1,9 triliun pada tahun 2011, akan tetapi beberapa indikator kesehatan belum mengalami perbaikan. Pembiayaan kesehatan Aceh di masa mendatang hendaknya menjawab beberapa tantangan utama seperti penyebaran sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang masih kurang memadai serta peningkatan kualitas program yang lebih bersifat menyeluruh dan preventif.

Porsi alokasi belanja infrastruktur Aceh terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Meskipun Aceh termasuk daerah yang memiliki sarana infrastruktur yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, namun kebutuhan infrastruktur khususnya akses jalan terhadap pusat-pusat ekonomi di perdesaan masih sangat dibutuhkan. Perencanaan pembangunan infrastruktur hendaknya mempertimbangkan beberapa isu-isu utama; kebutuhan akan sarana, kesenjangan antar daerah, termasuk potensi ekonomi.

Besarnya belanja pendidikan di Aceh belum berhubungan positif dengan hasil keluaran pendidikan. Meskipun Aceh telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kualitas pendidikan masih merupakan tantangan utama. Pembiayaan pendidikan di Aceh di masa mendatang hendaknya lebih dititikberatkan kepada program-program yang menunjang mutu pendidikan.

1. Penerimaan.

Grafik 1. Penerimaan Pemerintah Aceh 2000-2011



Sumber : Depkeu dan DPKKA

Penerimaan Aceh meningkat empat kali lipat secara riil pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2000. Pada tahun 2011 penerimaan Aceh terhitung sebesar Rp18 triliun, meningkat sebesar 17 persen dari tahun 2005. Searah dengan mulai diberlakukannya status otonomi khusus, Aceh menerima tambahan penerimaan yang signifikan.² Dengan adanya sumber dana baru, komposisi penerimaan Aceh turut berubah. Pada tahun 2011, dana Otsus dan bagi hasil migas tercatat menyumbangkan sekitar 29 persen dari penerimaan, sedangkan dana alokasi umum, masih merupakan sumber terbesar dari penerimaan Aceh, tercatat sebesar 40 persen, serupa dengan daerah lain di Indonesia, (Grafik 1)

Dana perimbangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat merupakan sumber utama penerimaan Aceh.³ Dana perimbangan apabila termasuk dana Otsus dan bagi hasil migas terhitung 85 persen dari keseluruhan sumber pendanaan di Aceh. Serupa dengan daerah lain di Indonesia, dana perimbangan tercatat sebesar 80 persen sebagai sumber utama dari pembiayaan pembangunan. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan keseluruhan Aceh masih terhitung rendah, terhitung sebesar 7 persen dari keseluruhan penerimaan, lebih rendah dari rata-rata daerah lain di Indonesia sebesar 12 persen.⁴

Meskipun meningkat, pertumbuhan penerimaan Aceh pada beberapa tahun belakangan tercatat melandai. Hal ini terutama diakibatkan oleh menurunnya produksi minyak dan gas. Produksi kilang gas Arun pada tahun 2010 tercatat menurun sebesar 8 persen

2 UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Aceh akan menerima alokasi sumber penerimaan baru yang berasal dari Dana Otonomi Khusus selama 20 tahun, yang berasal dari 2 persen dari Dana Alokasi Umum nasional (DAU) pada 15 tahun pertama dan 1 persen dari DAU nasional untuk 5 tahun terakhir. Aceh juga menerima tambahan dana bagi hasil migas yaitu 55 persen bagian dari pertambangan minyak dan 40 persen bagian dari gas bumi.

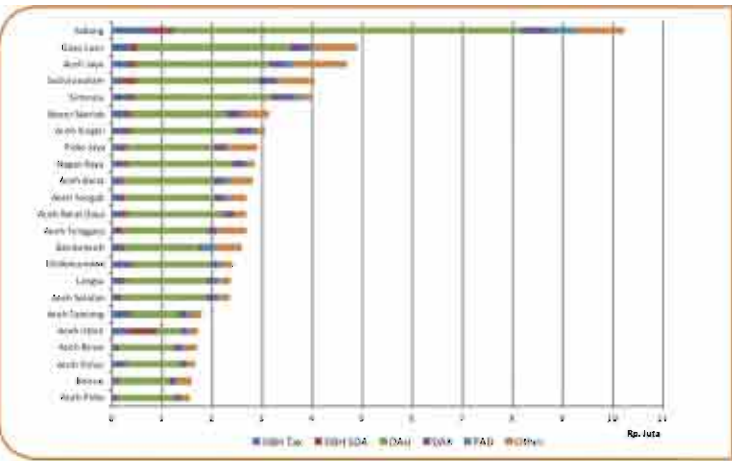
3 Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah.

4 Pertumbuhan pendapatan asli daerah provinsi masih cenderung stagnan, bahkan menurun tajam pada tahun 2011. Pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp802 miliar, menurun sebesar Rp 8 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun beberapa sumber penerimaan di dalam komponen PAD tercatat meningkat seperti pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang utamanya dari laba lembaga keuangan (BPD) tercatat menurun. Keuntungan pemerintah dari penempatan saham di PT. Bank Aceh tercatat menurun sebesar Rp31 miliar atau 32 persen dari tahun 2010. Di tingkat kabupaten/kota di Aceh, pertumbuhan PAD rata-rata tercatat 7 persen setiap tahunnya, jauh lebih rendah dengan rata-rata daerah lain sebesar 12 persen per tahun sejak tahun 2005

1 Analisis ini dibuat untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi keuangan pemerintah di Aceh dengan menggunakan data-data resmi yang bersumber dari Pemerintah Aceh, Departemen Keuangan, BPS dan sumber-sumber resmi lainnya. Data-data yang digunakan dalam analisis ini menggunakan data realisasi provinsi dan kabupaten/kota yang dikonsolidasikan. Analisis ini membahas perkembangan belanja publik Aceh yang mencakup Penerimaan, Belanja termasuk analisis belanja publik di beberapa sektor kunci; kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

atau 123 juta MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) dari 134 juta MMBTU pada tahun 2008. Penurunan produksi migas yang signifikan ini masih dapat ditutupi oleh peningkatan penerimaan dari sumber lain, terutama dana Otsus. Akan tetapi pada masa mendatang, penurunan produksi migas ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan keseluruhan Aceh. Untuk itu Aceh perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya di Aceh.⁵

Grafik 2. Komposisi Penerimaan Kabupaten/Kota Perkapita, 2010



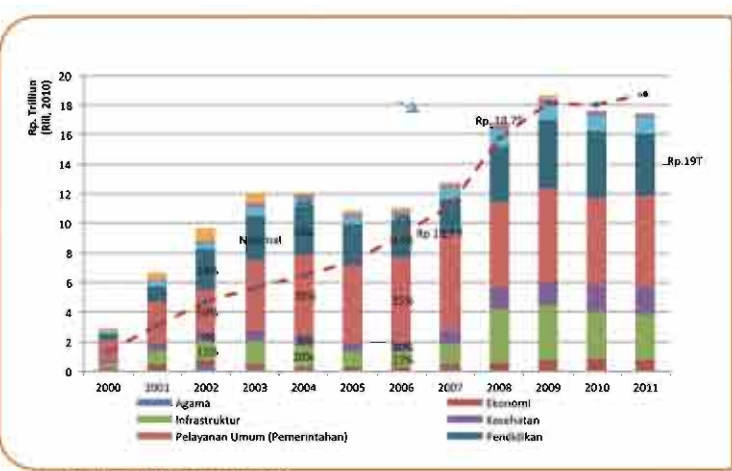
Sumber: SIKD, DPKKA dan estimasi PECAPP

Kesenjangan penerimaan antara kabupaten/kota masih cukup besar. Pada tahun 2010, Kota Sabang memiliki penerimaan daerah perkapita lebih besar enam kali lipat dari Kabupaten Aceh Pidie, yang tercatat sebesar Rp1,5 juta. Kabupaten yang termasuk memiliki pendapatan APBD tertinggi sebahagian besarnya adalah daerah-daerah yang memiliki populasi yang relatif kecil seperti Gayo Lues, Aceh Jaya dan Subulussalam, Grafik 2. Secara rata-rata penerimaan APBD Aceh perkapita pada tahun 2010 terhitung Rp3 juta dan hanya enam kabupaten yang tercatat di atas rata-rata, termasuk Simeulu dan Bener Meriah. Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih banyak, memiliki penerimaan daerah perkapita yang lebih rendah.

2. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah di Aceh turut meningkat searah dengan meningkatnya jumlah penerimaan. Terhitung sebesar Rp18.7 triliun pada tahun 2011, belanja pemerintah telah meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil jika dibandingkan dengan tahun 2005, yang tercatat sebesar Rp7 triliun. Peningkatan belanja ini searah dengan meningkatnya penerimaan yang berasal dari dana Otsus yang dimulai sejak tahun 2008, Grafik 3.

Grafik 3. Belanja Pemerintah (Provinsi / Kab-Kota)



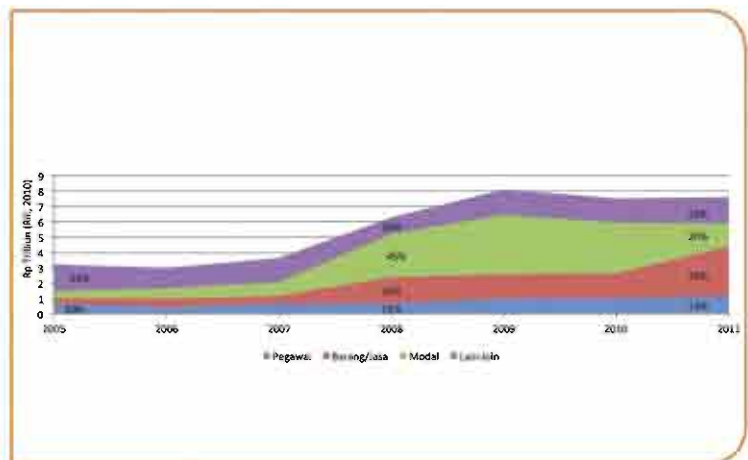
Sumber: Depkeu, DPKKA dan PECAPP

⁵ Pada tahun 2011, PAD dari keseluruhan daerah di Aceh terhitung hanya Rp1,2 triliun atau hanya sebesar 9 persen dari keseluruhan penerimaan, jauh lebih rendah dari rata-rata tingkat nasional yang tercatat sebesar 15,9 persen. Penerimaan terbesar Aceh sebagai bagian dari PAD adalah pajak khususnya dari kendaraan bermotor yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya

Belanja untuk pemerintahan umum memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja Aceh.⁶ Belanja ini terhitung sebesar 35 persen atau sebesar Rp 7,5 triliun dari keseluruhan belanja pemerintah di Aceh, sama dengan rata-rata provinsi lain di Indonesia yang tercatat sebesar 34 persen. Peningkatan terhadap belanja administrasi pemerintahan turut dipengaruhi oleh pemekaran daerah baru termasuk jumlah kecamatan dan desa. Pada tahun 2010, jumlah kecamatan dan desa tercatat sebesar 280 kecamatan dan 6.423 desa, berkembang dari 268 kecamatan dan 5.968 pada tahun 2006.

Alokasi belanja sektor infrastruktur dan pendidikan menurun pada tahun 2011. Meskipun secara nominal jumlah belanja kedua sektor ini tercatat meningkat dari Rp6,8 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp8,5 triliun pada tahun 2011, akan tetapi alokasi dari keseluruhan jumlah belanja menurun pada tahun 2011. Alokasi belanja sektor infrastruktur pada tahun 2011 terhitung sebesar 7 persen, sedangkan pada tahun 2009 terhitung sebesar 20 persen dari keseluruhan alokasi belanja pemerintah. Sedangkan alokasi terhadap belanja kesehatan meningkat signifikan sejak tahun 2010. Peningkatan belanja kesehatan secara signifikan didorong oleh program pemerintah Aceh yaitu Jaminan Kesehatan Aceh yang tercatat sebesar Rp243 miliar pada tahun 2010.

Grafik 4. Komposisi Jenis Belanja Provinsi



Sumber: Depkeu, DPKKA dan PECAPP

Belanja barang jasa memiliki porsi terbesar dari alokasi belanja provinsi, terhitung sebesar 42 persen pada tahun 2011. Peningkatan yang signifikan pada belanja barang jasa pada tahun 2011, terjadi terutama di sektor infrastruktur. Sekitar 73 persen dari belanja modal di bidang infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus diklasifikasikan sebagai belanja barang-jasa.⁷ Apabila dikategorikan sebagai belanja modal, pada tahun 2011, belanja modal pemerintah Aceh terhitung sebesar 30 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang terhitung sebesar 20 persen. Peningkatan belanja barang jasa juga terjadi sejak digulirkannya program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada tahun 2010, yang membebaskan biaya kesehatan bagi seluruh masyarakat Aceh, Grafik 4.

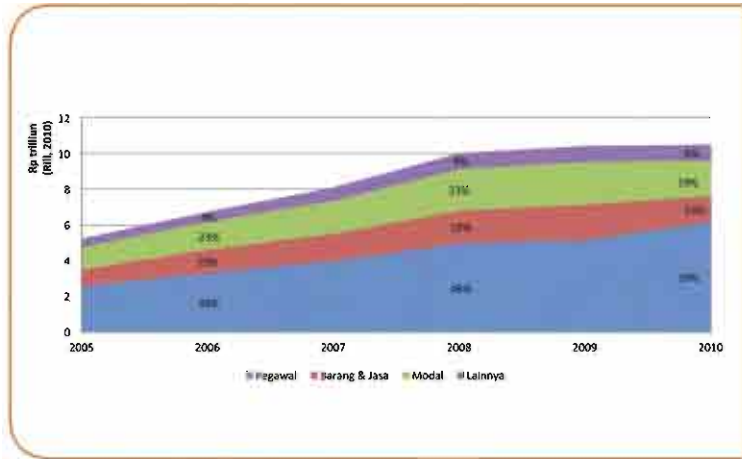
Secara keseluruhan, belanja pegawai merupakan belanja terbesar pemerintah di kabupaten/kota. Belanja pegawai tercatat sebesar 59 persen dari keseluruhan belanja di tingkat daerah, meninggalkan sedikit ruang bagi pembangunan, sedangkan hanya 34 persen pada tingkat provinsi, Grafik 5. Pada tahun 2010, total belanja pegawai dari seluruh

⁶ Menurut Permendagri 13/2006, yang termasuk belanja dalam klasifikasi pelayanan umum (administrasi pemerintahan) adalah belanja pemerintahan umum, sekretariat daerah, termasuk DPRD, administrasi keuangan, perangkat daerah, kearsipan dan komunikasi dan informatika. Belanja hibah/bantuan sosial-kemasyarakatan, termasuk beasiswa tercatat dalam administrasi keuangan.

⁷ Berdasarkan Permendagri 37 tahun 2010, bahwa belanja modal untuk pihak ketiga (masyarakat) dapat di catat sebagai belanja barang dan jasa (Kabupaten/ Kota). Pada tahun 2011, belanja modal pemerintah Aceh untuk Otsus dicatat sebagai belanja barang dan jasa untuk pihak ketiga, dalam hal ini kabupaten/kota. Hal ini dilakukan salah satunya untuk memudahkan pencatatan dan pengalihan asset-asset tetap seperti sarana jalan raya dan bangunan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Penggunaan dana Otsus meskipun merupakan porsi kabupaten kota (pembagian alokasi Otsus kab/kota menggunakan formula tertentu seperti DAU) pada saat ini masih di administrasikan oleh pemerintah provinsi tetapi proses pelaksanaan anggaran, pengadaan dilakukan oleh kabupaten/kota sedangkan provinsi menyetujui kegiatan, pembayaran dan pemeriksaan.

kabupaten/kota tercatat sebesar Rp6,1 triliun atau sekitar 7 persen dari PDRB Aceh, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang jumlah belanja pegawai hanya terhitung sebesar 2,7 persen dari keseluruhan PDRB Indonesia. Pada tahun 2011, Aceh memiliki lebih dari 72.300 pegawai negeri sipil, meningkat dari sekitar 65.000 pegawai pada tahun 2009.

Grafik 5. Komposisi belanja Kabupaten / Kota



Sumber : Depkeu, DPKKA dan PECAPP

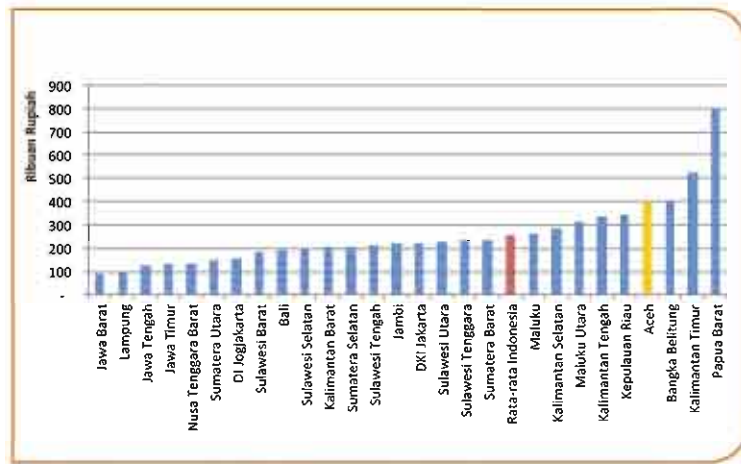
3. BELANJA SEKTOR-SEKTOR UTAMA

3.1 Sektor Kesehatan

Belanja perkapita kesehatan Aceh berada pada urutan ke empat di Indonesia. Angka nasional pada tahun 2010 menunjukkan biaya perkapita rata-rata provinsi di Indonesia adalah Rp255 ribu. Aceh merupakan Provinsi dengan belanja kesehatan perkapita terbesar

keempat di Indonesia, terhitung sebesar Rp400 ribu⁸ Meskipun belanja pemerintah provinsi Jawa Barat yang terhitung sebesar Rp3,15 triliun lebih besar dari pada provinsi Papua Barat, akan tetapi menduduki peringkat terakhir dalam pembiayaan perkapita. Jumlah belanja yang relatif besar ini semestinya memberikan kesempatan bagi Aceh untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Banyaknya jumlah penduduk merupakan salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, Grafik 6.

Grafik 6. Belanja kesehatan perkapita, 2010



Sumber : Depkeu, DPKKA dan PECAPP

Belanja kesehatan Aceh yang berasal dari APBA terus meningkat; hampir Rp1,9 triliun pada 2011. Pada tahun 2011, pembiayaan yang dilakukan provinsi terhitung sebesar Rp799 miliar, sedangkan kabupaten Rp1,1 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2005, pembiayaan

⁸ Karena keterbatasan data, provinsi seperti Riau, Bengkulu, Banten NTT dan Papua tidak termasuk dalam analisis ini.

KETERLAMBATAN PENGESAHAN ANGGARAN

Proses pengesahan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh sering tidak sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak dari kabupaten/kota di Aceh yang mengalami keterlambatan penetapan APBD pada tahun 2011, kecuali beberapa daerah seperti Banda Aceh dan Aceh Tengah. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, pemerintah Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD-nya. Pada tahun 2011, rata-rata kabupaten/kota di Aceh mengalami keterlambatan selama 52 hari. Kabupaten Bireun dan Provinsi Aceh mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan pada tahun 2011.

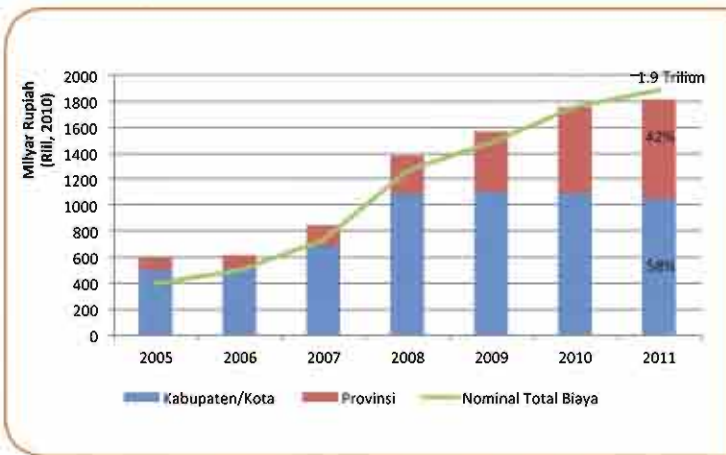


Keterlambatan pengesahan APBD akan berdampak langsung kepada keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 4 tahun 2011, tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah disebutkan bahwa batas waktu penyampaian APBD kepada pemerintah pusat adalah paling lambat tanggal 30 Januari tahun anggaran bersangkutan. Jika dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu menepati batas waktu tersebut, Departemen Keuangan akan memberikan peringatan tertulis yang berlaku selama 30 hari. Sanksi akan dipertegas bila masih ada daerah yang tidak mampu memberikan laporan APBD pada bulan Maret. Sanksi ini berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 25 persen dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang dibenarkan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan. Dalam prakteknya, keterlambatan penyaluran dana DAU ini membawa dampak pada terhambatnya kegiatan-kegiatan pembiayaan seperti belanja rutin untuk pembayaran gaji pegawai dan kegiatan administratif lainnya.

Keterlambatan pengesahan anggaran juga akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan kualitas pembangunan. Program/kegiatan pembangunan secara langsung untuk masyarakat tidak dapat dilakukan sebelum pengesahan anggaran dilakukan. Semakin lama masa pengesahan anggaran maka semakin pendek masa pelaksanaan kegiatan pembangunan yang secara langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat termasuk kualitas pembangunan. Keterlambatan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran (SILPA) dengan rata-rata tingkat realisasi 80 persen selama 6 tahun terakhir. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada akhirnya juga menjadi beban pembangunan pada tahun berikutnya.

kehatan secara riil meningkat tiga kali lipat pada tahun 2011, Grafik 7. Porsi terbesar pembelanjaan terletak di tingkat kabupaten/kota tercatat sebesar 57 persen. Pembiayaan di tingkat provinsi meningkat signifikan sejak tahun 2008, searah dengan adanya tambahan sumber pembiayaan dari dana Otsus. Program pemerintah JKA yang dihitung sebesar Rp243 miliar pada tahun 2010 dan Rp400 miliar tahun 2011 turut menambah porsi pembiayaan kesehatan provinsi.⁹

Grafik 7. Belanja kesehatan Aceh



Sumber: Depkeu, DPKKA dan PECAPP

Capaian keluaran kesehatan menunjukkan kemajuan akan tetapi beberapa tantangan utama masih ada. Meskipun tercatat sebagai salah satu daerah yang memiliki alokasi belanja yang tinggi di Indonesia, beberapa indikator dasar dari capaian kesehatan masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. IPM Aceh tahun 2010 berada pada urutan 18 dari 33 provinsi di Indonesia, Tabel 1. Angka kematian bayi di Aceh lebih baik dari target nasional, namun angka kematian ibu (AKI) di Aceh masih berada jauh dari atas target AKI Kementerian Kesehatan tahun 2014 yang berjumlah 112 per 100,000 kelahiran-hidup.

Tabel 1. Indikator Kesehatan Aceh

Indikator	2007	2008	2009	2010
IPM	70,35	70,76	71,31	71,70
Umur Harapan Hidup (UHH)	69	68,5	68,5	68,7
Angka Kematian Bayi (per 1000 LH)	40	37	25	16,3
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	238	181	181	193

Sumber: Depkeu, DPKKA dan PECAPP

Meskipun jumlah sarana kesehatan di Aceh relatif baik, namun disparitas jumlah sarana kesehatan antar kabupaten/kota masih terbilang tinggi. Secara rata-rata, setiap satu unit fasilitas kesehatan (terhitung untuk rumah sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) di Aceh melayani sekitar 3.500 orang.¹⁰ Pada tahun 2011, satu unit fasilitas kesehatan di Kota Langsa melayani sekitar 9,000 orang penduduk, berkebalikan dengan kota Simeulu dan Sabang, dimana satu fasilitas kesehatan melayani 700 penduduk di Simeulu, dan 1.500 penduduk di Sabang, Grafik 8. Namun demikian, jumlah Puskesmas yang merupakan pusat rujukan pertama kesehatan bagi masyarakat di Aceh telah mencukupi dari yang dibutuhkan.¹¹

Akses sebaran pusat pelayanan kesehatan di Aceh juga merupakan salah satu tantangan utama di bidang kesehatan. Secara rata-rata jarak terdekat dari kediaman penduduk di Aceh ke fasilitas kesehatan masyarakat terdekat adalah 8 kilometer (Km), Grafik 9.¹²

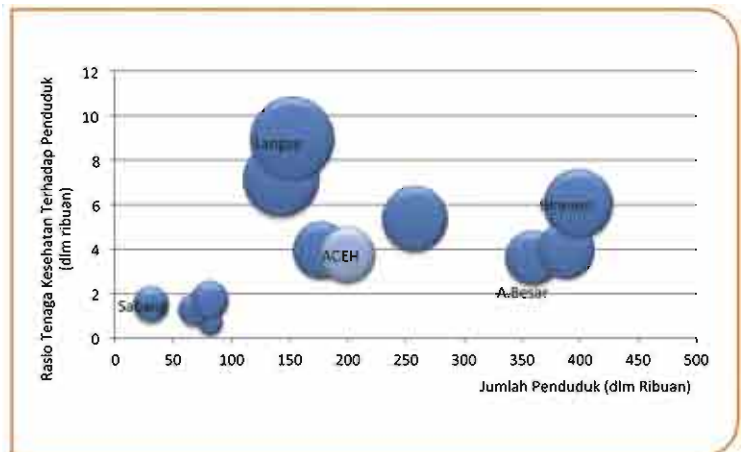
⁹ Pembiayaan berasal dari APBN cenderung menurun. Pada tahun 2007, pembiayaan kesehatan yang berasal dari APBN tercatat sebesar Rp42 milyar atau 24% dan keseluruhan pembiayaan kesehatan Aceh. Pada tahun 2011, tercatat hanya 2% atau Rp.13,18 milyar saja yang berasal dari APBN, sementara lainnya bersumber APBA.

¹⁰ Sarana kesehatan disini termasuk, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit dan Pos Bersalin Desa.
¹¹ Pada tahun 2011, Aceh memiliki sekitar 325 puskesmas dengan rasio 1:14.200, yang berarti satu puskesmas melayani 14.200 penduduk, jauh lebih baik dari target nasional yang terhitung sebesar 1:30.000 penduduk.

¹² Fasilitas kesehatan disini adalah; Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa. Data Podes, 2011.

Beberapa kabupaten/kota cenderung memiliki jarak yang lebih dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Banda Aceh. Sedangkan Kabupaten Simeulu, secara rata-rata, jarak pelayanan kesehatan dengan kediaman penduduk terhitung sejauh 37 km, sedangkan kota Banda Aceh terhitung sejauh 2 km. Beberapa desa yang terletak di kabupaten Simeulu, Sabang, Subulussalam, masih penduduk yang harus menempuh lebih dari 20 km dalam mendapatkan pelayanan kesehatan publik.

Grafik 8. Sebaran sarana kesehatan - penduduk



Sumber: Podes, BPS, 2011

Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)

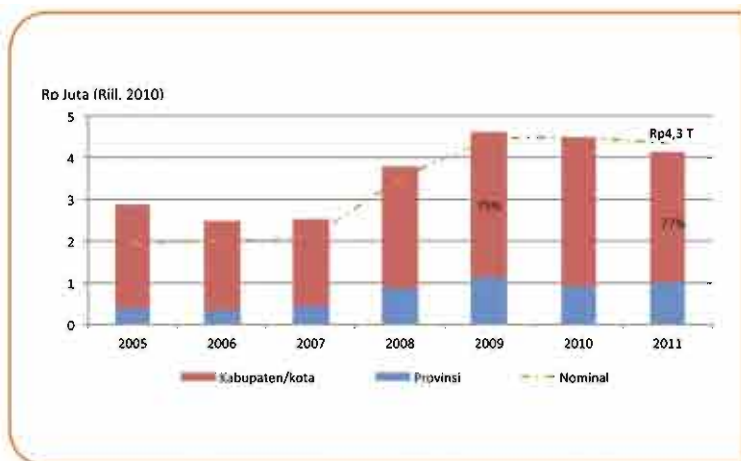
Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) adalah sebuah program pemerintah Aceh yang dimulai sejak Juni 2010. Program JKA menjangkau masyarakat Aceh terhadap pelayanan kesehatan dengan menghilangkan kendala biaya ketika masyarakat Aceh berobat. Penggunaan fasilitas kesehatan pemerintah tidak lagi memungut biaya administrasi maupun biaya pelayanan kesehatan. Secara umum, tujuan program JKA adalah mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hingga pertengahan tahun 2012, Pemerintah telah mengeluarkan belanya Rp28 miliar per bulan JKA sejak Juni 2010.

Pelayanan JKA meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan. Pada tahun 2010, JKA melayani 897 ribu masyarakat Aceh yang berobat ke Puskesmas, atau 128 ribu kunjungan rawat jalan setiap bulannya di Puskesmas. Sedangkan pada tahun 2011, hanya 66 ribu kunjungan perbulannya. Menurut Laporan PT. Askes sebagai Pelaksana Program JKA selama hampir 20 bulan pelaksanaan dana JKA hingga tahun 2011, sekitar Rp600



Peningkatan belanja pendidikan ini erat kaitannya dengan adanya tambahan penerimaan provinsi dari otonomi khusus dan bagi hasil migas. Tahun 2011, total belanja pemerintah untuk sektor pendidikan secara nominal terhitung sebesar Rp4,3 triliun, meningkat dua kali lipat dari tahun 2007, yang terhitung sebesar Rp2,1 triliun, Grafik 16. Meskipun secara nominal meningkat, belanja pendidikan secara riil menurun pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 sebesar 10 persen.¹⁹

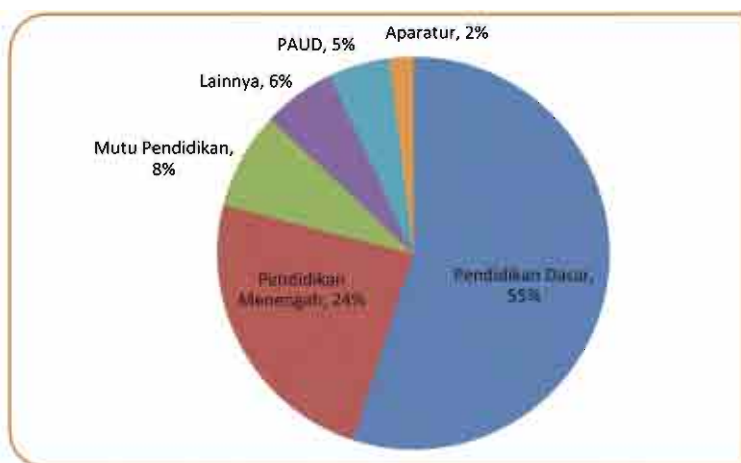
Grafik 16. Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan



Sumber: DPKKA, PECAPP, 2011

Program pendidikan dasar memiliki porsi terbesar dalam belanja pendidikan di tingkat provinsi. Lebih dari 55 persen belanja pendidikan atau sekitar Rp420 miliar pada tahun 2011 dibelanjakan pada program pendidikan dasar. Sedangkan program peningkatan mutu pendidikan hanya terhitung sebesar 8 persen dari keseluruhan belanja pendidikan, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang terhitung sebesar 6 persen, Grafik 17.²⁰ Program terbesar pada program pendidikan dasar adalah bantuan beasiswa yatim piatu terhitung sebesar Rp207,9 miliar atau hampir 50 persen dari program pendidikan dasar.²¹

Grafik 17. Komposisi Anggaran Pendidikan



Sumber: DPA Dinas Pendidikan, PECAPP, 2011

Kapitalisasi pembangunan sarana pendidikan dasar di tahun 2011 cukup signifikan, meskipun sarana fisik dari pendidikan dasar sudah sangat memadai.²²

¹⁹ Meskipun meningkat, alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan belum sesuai dengan yang diamanatkan perundang-undangan. Porsi belanja pendidikan pada pemerintah provinsi pada tahun 2011 terhitung sebesar 13 persen dari keseluruhan belanja, masih dibawah yang diamanatkan undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pendidikan. Pasal 49 UU No. 20/2003 mensyaratkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.

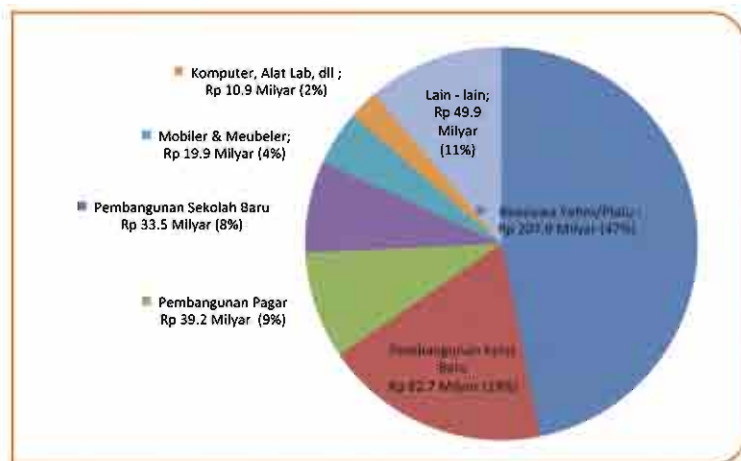
²⁰ Laporan Perkembangan Pendidikan Nasional, Kemendiknas, 2011.

²¹ Tahun 2011, pemerintah Aceh memberikan beasiswa kepada 115.510 anak yatim/piatu sebesar Rp 207,9 Milyar (47 persen dari total belanja dinas pendidikan) di 23 kabupaten/kota (masing – masing anak mendapatkan sebesar Rp 1.800.000).

²² Sarana yang dimaksud antara lain: Pembangunan bangunan sekolah baru (41 unit), penambahan ruang kelas (167 unit), serta beberapa sarana yang mendukung mutu proses belajar dan menagajar seperti laboratorium, perpustakaan, dan mobiler.

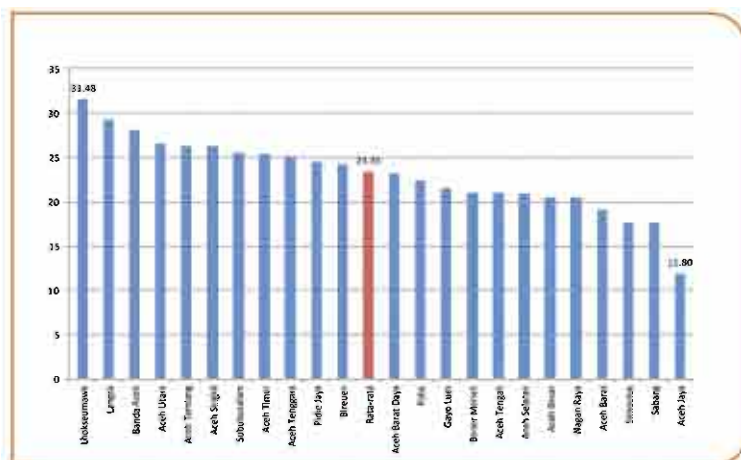
Hampir 40 persen atau sebesar Rp173 miliar telah dibelanjakan untuk meningkatkan sarana fisik sekolah, seperti ruang kelas, pagar sekolah dan mobiler, menyisakan sedikit ruang bagi program peningkatan mutu dan keluaran pendidikan lainnya. Belanja modal untuk pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas yang baru di beberapa wilayah kabupaten/kota mencapai Rp116,2 miliar, sedangkan pembangunan pagar sekolah terhitung menyerap anggaran sebesar 9 persen, terhitung sebesar Rp3,9 miliar, Grafik 18.

Grafik 18. Komposisi Anggaran Pendidikan Dasar



Sumber: DPA Dinas Pendidikan Aceh, PECAPP, 2011

Grafik 19. Jumlah siswa perkelas



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Rasio jumlah siswa perkelas pada jenjang pendidikan dasar Aceh cukup memadai. Secara keseluruhan, daya tampung siswa perkelas di Aceh terhitung sebanyak 23 siswa per ruang kelas untuk sekolah dasar dan 30 untuk sekolah menengah, jauh lebih tinggi dari standar pelayanan minimal yang disyaratkan. Tingkat ketersediaan ruang kelas yang disyaratkan adalah tidak melebihi 32 orang untuk sekolah dasar dan 36 orang untuk sekolah menengah.²³ Kota Lhokseumawe memiliki rasio kelas siswa tertinggi, tercatat sebanyak 31 siswa dalam satu kelas (rombongan belajar), sedangkan Aceh Jaya, Sabang dan Simeulu memiliki jumlah kelas yang sangat memadai, dimana satu ruang kelas menampung tidak lebih dari 20 siswa, Grafik 19.

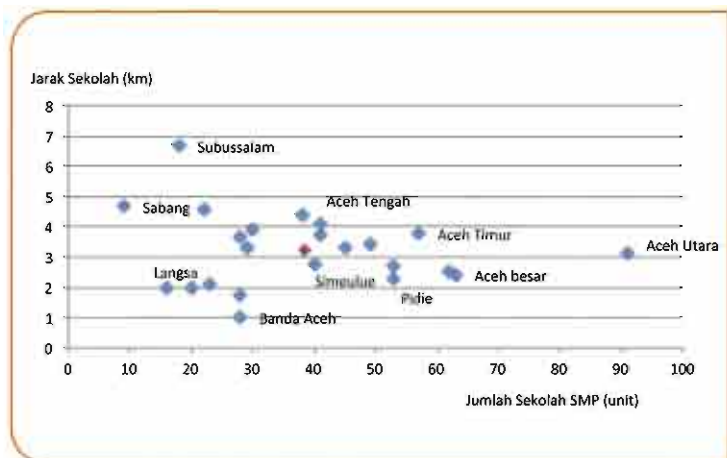
Jarak tempuh sekolah dengan pemukiman pada umumnya terjangkau.²⁴ Akses sekolah untuk sekolah dasar dan menengah di Aceh secara rata-rata terhitung sejauh 1,6 Km dan 3,2 Km. Jarak ini masih cukup terjangkau dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memiliki jarak tempuh sekolah tingkat dasar terdekat, tercatat hanya 0,6 Km, sedangkan Aceh Singkil dan Bener Meriah memiliki jarak tempuh dari rumah ke sekolah

²³ Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal pendidikan dasar mensyaratkan setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan SMP/MTs tidak melebihi 36 orang dalam satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup serta papan tulis.

²⁴ Permendiknas No. 15 tahun 2010 menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) mensyaratkan penyediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

yang relatif lebih jauh, terhitung sejauh 2,8 Km dan 2.7 Km. Untuk sekolah menengah, Aceh Barat memiliki jarak tempuh yang relatif jauh, terhitung sejauh 4 Km, sedangkan jarak tempuh sekolah di Banda Aceh hanya 1 Km, Grafik 20.

Grafik 20. Nilai UAN dan Belanja Pendidikan



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2010

Besarnya belanja pendidikan belum tentu searah dengan hasil capaian mutu dari pendidikan. Secara umum, beberapa indikator mutu seperti tingkat kelulusan dan mutu guru masih kurang baik.²⁵ Beberapa kabupaten yang memiliki belanja pendidikan yang relative tinggi memiliki nilai ujian akhir nasional yang rendah, seperti Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Sedangkan Bireun, Aceh Utara dan Banda Aceh yang memiliki belanja pendidikan perkapita yang lebih rendah mencatat nilai ujian akhir nasional yang relatif baik. Besarnya komposisi belanja rutin pada bidang pendidikan di kabupaten/kota menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki mutu keluaran bidang pendidikan di masa mendatang, Grafik 21. Tantangan lainnya adalah kualitas guru di Aceh yang relatif rendah. Kualitas guru di Aceh berada pada peringkat 28 nasional.²⁶ ●

PECAPP
PUBLIC EXPENDITURE ANALYSIS AND
CAPACITY STRENGTHENING PROGRAM

Analisis Belanja Publik Aceh 2011

²⁵ Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) Depdiknas menunjukkan bahwa ranking Aceh berdasarkan tingkat kelulusan berada pada ranking 21 nasional untuk SMP, dan 26 untuk SMA. Sedangkan uji kompetensi guru, kualitas guru di Aceh berada pada peringkat 28 nasional.

²⁶ Definisi guru layak mengajar mengacu pada UUGD No.14/2005 Bab IV Pasal 10, yaitu guru yang memiliki kompetensi kepribadian, professional, sosial dan padagogik. Hasil uji kompetensi guru tingkat nasional menunjukkan kualitas guru dari Aceh berada pada peringkat 28 nasional dari 33 provinsi.

PECAPP

Kantor Gubernur Aceh
Lt. 2 Gedung Biro Organisasi
Jl. T. Nyak Arief No. 219
Email: pecapp.aceh@gmail.com
www.belanjapublikaceh.org